

RINGKASAN

Nasywa Anindya
210510072

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PENETAPAN WALI ASUH BAGI ANAK DI BAWAH
UMUR YANG DILAHIRKAN DI LUAR
PERKAWINAN**
(Studi Putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan
Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn)

(Laila M Rasyid, S.H., M.Hum. dan Nabhani Yustisi,
S.H., M.H)

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dicatatkan dianggap sebagai anak tidak sah, dan sering kali menghadapi ketidakpastian hukum selayaknya anak sah. Terutama ketika terjadi perpisahan ranjang antara suami istri, dan memiliki anak, yang menjadi persoalan ialah siapa yang berhak menjadi wali pengasuh dari anak tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam 2 Penetapan Pengadilan Negeri Medan yaitu Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn. permohonan tersebut diajukan oleh seorang ibu kandung yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan maksud dan tujuan untuk ditetapkan sebagai wali pengasuh. Pada perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima dengan alasan masih terikatnya perkawinan secara adat. Kemudian, dua bulan pasca dibacakannya putusan tersebut, pemohon mengajukan kembali permohonannya dengan perkara Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, dan hakim menetapkan permohonan dikabulkan dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim pada kedua Penetapan Pengadilan Negeri Medan atas permohonan yang sama dan menjelaskan implikasi yuridis dari perbedaan kedua Penetapan tersebut. Metode dari penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*) serta bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn terdapat adanya indikasi inkonsistensi dalam pertimbangan hakim sehingga menghasilkan amar penetapan yang berbeda pada kasus yang serupa. Ketidakkonsistenan dalam kedua Penetapan Pengadilan Negeri Medan ini lebih mengedepankan keadilan, dan kemanfaatan. Disarankan kepada pemerintah bersama lembaga legislatif perlu melakukan penyesuaian dan penyalarsan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur status hukum anak yang lahir diluar perkawinan, khususnya terkait hak perwalian. Kemudian, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri perlu memiliki pedoman yang sama dalam menetapkan wali asuh terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Kata kunci: Perwalian Asuh, Anak dibawah Umur, Anak diluar Perkawinan, Pengadilan Negeri Medan

SUMMARY

Nasywa Anindya
210510072

*Juridical Analysis of Guardianship Appointment
Petitions for Underage Children Born Out of Wedlock
(A Study of Rulings Number 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn and
Number 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn)*

*(Laila M Rasyid, S.H., M.Hum. and Nabhani Yustisi,
S.H., M.H)*

In the Indonesian legal system, a child born outside of a legally registered marriage is considered an illegitimate child and often faces legal uncertainty, unlike a legitimate child. This is especially evident in cases where the parents separate or divorce, raising legal questions about who has the rightful authority to act as the child's legal guardian. This issue is illustrated in two rulings issued by the Medan District Court: Decision Number 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn and Decision Number 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn. The petition in both cases was filed by the biological mother and registered at the clerk's office of the Medan District Court, with the intention of being appointed as the child's legal guardian. In Case Number 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn, the judge declared the petition inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) on the grounds that the marriage was still valid under customary law. However, two months after the verdict was delivered, the petitioner refiled the same request under Case Number 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn. This time, the judge granted the petition, reasoning that it was in the best interest of the child.

The objective of this study is to explain the judicial considerations behind the rulings in Decision Number 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn and Decision Number 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, which concern the same petition, and to explore the legal implications of the differences between the two decisions. The method used in this research is qualitative in nature, employing a normative juridical approach and a case approach to obtain answers to the research questions. The study is descriptive-analytical, utilizing both primary and secondary legal materials.

The results of the research indicate that there is an inconsistency in judicial reasoning between the two rulings of the Medan District Court Decision Number 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn and Decision Number 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn which led to different outcomes for essentially the same case. This inconsistency fails to reflect the core objectives of law: justice, legal certainty, and utility.

It is recommended that the government and legislative bodies revise and harmonize the statutory provisions regulating the legal status of children born out of wedlock, especially concerning guardianship rights. Furthermore, there is a need for specific guidelines governing the guardianship of children born outside of marriage, in order to ensure child protection and provide legal certainty for all parties involved. Religious Courts and District Courts should also adopt a unified guideline when determining guardianship in such cases.

Keywords: *Child Guardianship, Minors, Children Born Out of Wedlock, Medan District Court*